

Daftar Isi
Jurnal Masyarakat dan Budaya
Volume 21 No. 3 Tahun 2019

	Halaman
PengantarRedaksi Topik:	iii
☞ Strategi Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Preferensi Masyarakat Asli: Studi Kasus di Raja Ampat <i>Ade Yunita Iriani</i>	271
☞ Dampak Sosial-Ekonomi Pemindahan Paksa: Studi Atas Penyintas Lumpur Lapindo, Jawa Timur <i>Anton Novenanto</i>	293
☞ <i>Framing and Navigating Breastfeeding as A Development Issue</i> <i>Sentiela Ocktaviana & Angga Sisca Rahadian</i>	317
☞ <i>Resignification: Wacana Balik Orang Papua dalam Menanggapi Rasisme</i> <i>Ubaidillah</i>	327
☞ Reproduksi Moda (Pertukaran) Pangan: Menyemai Daulat Hidup di Sumba Barat (Daya) <i>PM Laksono, Esti Anantasari, & Olga Aurora Nandiswara</i>	341
☞ <i>Tragedi Kebun Tebu : Pengaruh Perubahan Sosial pada Pertunjukan Ludruk</i> <i>Herlina Kusuma Wardani, Andayani, Djoko Sulaksono, & Kundharu Saddhono</i>	355
☞ Watu Semar: Sebuah Refleksi Pemikiran dan Budaya Lokal Masyarakat Sambongrejo, Bojonegoro <i>Milawaty</i>	371
☞ <i>Discourse of Family Well-Being and The Value of Work at Rprtra's Testimonial Videos</i> <i>Sunar Wibowo, Rustono Farady Marta, Hana Panggabean</i>	383
Tinjauanbuku: ☞ Repertoar Masyarakat Migran: Sebuah Perjalanan Mencari Identitas <i>Anggy Denok Sukmawati</i>	397

PENGANTAR REDAKSI

Kebudayaan dan Pembangunan di Era *Cultural Turn*

Kebudayaan dan pembangunan adalah dua hal yang sesungguhnya erat terkait. Keduanya saling terkait dan mempengaruhi – perubahan kebudayaan dan laju pembangunan akan senantiasa terus membentuk perkembangan dan peradaban masyarakat ke depan. Dalam konteks ini, maka keduanya tak bisa dipilah-pisahkan sama sekali. Kebudayaan tak bisa dilepaskan karena ia adalah matras dari peradaban dan pembangunan adalah hal yang tak terelakkan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat yang terus berubah. Namun demikian, hubungan keduanya tidaklah selalu mulus. Dalam sejarahnya, kebudayaan dan pembangunan mengalami ketegangan-ketegangan yang berdampak pada masyarakat secara konkret.

Dalam konteks perkembangan ilmu sosial, belakangan ini muncul istilah *cultural turn*, suatu gejala yang menunjuk pada kembalinya isu kebudayaan dalam diskursus mutakhir. Isu kebudayaan sendiri memang telah lama menempati ruang yang sangat marjinal karena, terutama dalam diskursus pembangunan, ia dianggap sebagai salah satu penghalang pembangunan. Kentalnya wacana orientalisme dalam berbagai proyek pembangunan, terutama di negara dunia ketiga, memang tak bisa dihindari. Kebudayaan seringkali dianggap sebagai faktor utama yang menghambat kemajuan sebuah bangsa dan memicu persoalan sosial, seperti kemiskinan, gizi buruk, bahkan kriminalitas. Hal itu kemudian menyebabkan berbagai proyek pembangunan seringkali harus mengalami sekuritisasi, dengan mantra utamanya adalah “*nosecurity without development*”, dan “*no development without security*” (Duffield, 2006).

Dalam konteks yang lain, Tania Li (2007) menyebut bahwa pembangunan seringkali dianggap sebagai *rendering technical*, semata-mata persoalan teknis. Ini membuat proyek pembangunan hanya menjadi persoalan teknis dan keahlian yang kemudian memunculkan garis batas pada pelaku yang terlibat pembangunan dibagi menjadi yang ahli dan yang bukan ahli. Dalam konteks itu pula, proyek pembangunan menjadi kegiatan yang apolitis, tak terkait sama sekali dengan persoalan politik, karena, lagi-lagi, argumentasinya adalah persoalan teknis. Padahal, sebagaimana disebut Li, pembangunan erat terkait dengan persoalan politik, dan tentu saja juga persoalan kebudayaan. Ia tidak bisa dipisahkan sama sekali untuk kemudian dilegitimasi hanya oleh argumentasi semata-mata teknis.

Jika konteks “*security-development*” mengandaikan kebudayaan harus “ditertibkan” atau diselaraskan dengan konsep pembangunan yang maju, rasional, dan modern itu, dalam konteks “*rendering technical*” kebudayaan harus dilepaskan dari proyek pembangunan karena persoalan teknis. Intinya, kebudayaan hanya akan menjadi penghambat karena nilai yang tidak selaras atau tak perlu dipertimbangkan karena ia di luar persoalan teknis. Padahal, sebagaimana dicatat oleh White (2002), pembangunan bukanlah semata-mata persoalan material, tapi juga teknis dan proses produksi pengetahuan (*materiality, technique of transformation, mode of knowing*). Oleh karena itu, setiap proyek pembangunan selalu harus dibaca sebagai proses transformatif yang akan berdampak besar pada masyarakat.

Namun demikian, pada prakteknya, argumentasi dan faktor kebudayaan yang mewujud dalam berbagai bentuknya seperti agama, tradisi, pengetahuan lokal, dan ragam festival kebudayaan lokal seringkali diingkari. Dalam konteks pembangunan yang bias orientalis itu, kebudayaan yang berbeda dengan yang diandaikan oleh pemegang teguh orientalisme yang sangat biasa itu, *the master*, maka ragam ekspresi kebudayaan itu akan dilyankan (*othering*), dianggap sebagai hal yang tidak sejalan dengan arah pembangunan yang modern dan rasional, karena berbagai ekspresi kebudayaan itu masih sering dianggap sebagai yang terbelakang, tidak rasional, kuno, dan bahkan barbar. Asumsi yang kuat ini menjadikan proyek pembangunan menjadi tidak efektif dan seringkali menimbulkan soal baru.

Barangkali, contoh penting tentang bagaimana kebudayaan liyan dipandang secara berbeda dan dengan nada peyoratif adalah pandangan Samuel Huntington (1993) yang mencatat bahwa agama, kebudayaan, atau peradaban di luar Barat akan menjadi tantangan baru bagi “*the new world order*”

setelah Uni Soviet tumbang. Dalam analisisnya, terutama ketika berhubungan dengan Islam, bisa disimpulkan bahwa Islam sebagai agama yang, baginya, punya sejarah panjang dan diwarnai oleh darah karena peperangan di masa awal, akan menjadi ancaman yang serius. Sebagaimana pandangan para orientalis, Islam dianggap sangat monolitik dan stagnan, seolah hanya itulah wajah Islam dan ia sangatlah jumud, tidak mengalami perubahan. Pandangan ini tentulah sangat simplistik. Namun, setidaknya ini menggambarkan bahwa hanya kebudayaan yang sesuai dengan “*the new order*” lah yang akan diterima -- dan logika yang bias semacam ini banyak mendasari berbagai proyek pembangunan.

Pada konteks inilah, gejala *cultural turn* menemukan ruang gugatan dan pertarungannya. Pengusung isu *cultural turn* menolak pemaknaan kebudayaan yang tunggal dan jumud, seolah-olah kebudayaan hanyalah seonggok norma dan nilai yang tidak dinamis sama sekali. Bagi sebagian mereka, pengertian kebudayaan, terutama yang sangat parsonian juga haruslah digugat. Kebudayaan dalam bingkai ini mengandaikan kebudayaan yang dimaknai hanya sebagai kumpulan nilai, sistem, dan norma yang disepakati dan akan menjadi landasan utama penilaian sebuah tindakan. Pemahaman jenis ini dianggap membatasi *human agency*. Bagi pengusung *culturalturn*, kebudayaan tidak perlu dimaknai secara tunggal dan jumud, melainkan sebagai suatu bagian yang integral dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengacu pada pengertian yang dinamis ketika kebudayaan selalu dalam proses “menjadi” (*becoming*) yang mengandaikan pengalaman sehari-hari individual menemukan ruangnya.

Nash (2001) mencatat bahwa *cultural turn*, dalam konteks kajian sosial, berdampak tidak hanya pada level epistemologis tetapi juga historis. Pada konteks epistemologis, kebudayaan dipandang sebagai hal yang konstitutif dalam relasi sosial dan pembentukan identitas. Artinya, kebudayaan adalah sesuatu yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Ia adalah sesuatu yang melingkupi tindakan dan cara mengidentifikasi diri dari seluruh proses sosial umat manusia. Dalam konteks historis, kebudayaan dimaknai sebagai sesuatu yang memainkan peran yang sangat penting, yang tidak diharapkan sebelumnya, dalam relasi sosial dan konstruksi identitas dalam masyarakat kontemporer. Ini mengandaikan babak baru bagi isu kebudayaan yang telah lama diingkari dalam perdebatan berbagai diskursus pembangunan sosial dan politik.

Pada era *cultural turn* inilah, kebudayaan akan memainkan peran yang penting bagi proyek pembangunan yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi prioritas pemerintah saat ini karena ia adalah bagian dari perilaku dan tindakan sehari-hari, dan karena itu tidak bisa diingkari. Pengingkaran kebudayaan akan berdampak pada pembangunan yang hanya akan *mrucut*, meminjam istilah Giddens (1999), atau pembangunan hanya akan berujung pada *distorted development* sebagaimana diungkap oleh Sklair (1994). Beberapa tulisan dalam JMB edisi sekarang menggambarkan bagaimana kebudayaan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menghadapi persoalan sehari-hari di tengah hiruk pikuk isu pembangunan yang terus bergaung.

Tulisan tentang bagaimana kebudayaan dan orang-nya diingkari itu tergambar dari artikel tentang pengembangan pariwisata di Raja Ampat. Di satu sisi Raja Ampat menjadi destinasi wisata bahari yang banyak menarik wisatawan yang terus meningkat tiap tahun, keterlibatan masyarakat lokal atau asli masih sangat minim. Namun, di sisi lain, kerusakan lingkungan akibat aktivitas pariwisata ini juga menjadi persoalan tersendiri. Dalam temuannya, penulis menyebutkan bahwa pelibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata Raja Ampat berdampak positif bagi pemberdayaan warga dan pelestarian lingkungan di sana, tetapi sayang masih belum maksimal. Padahal, pelibatan masyarakat lokal dalam industri pariwisata ini bisa menjadi kunci penting dalam mendorong upaya pemberdayaan warga lokal dan pelestarian lingkungan.

Artikel tentang dampak sosial-ekonomi akan pemindahan paksa dalam kasus lumpur Lapindo juga menggambarkan hal serupa tentang bagaimana faktor kebudayaan tidak menjadi pertimbangan serius. Peneliti menemukan bahwa pemindahan ini berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang kini mengalami persoalan serius dalam hal mengakses tanah dan bangunan mereka, jenis pekerjaan baru yang mengandaikan tuntutan yang berbeda, gangguan akses terhadap fasilitas dan layanan publik, dan terutama ikatan sosial kebudayaan yang berubah karena lingkungan dan komunitas baru. Ini menunjukkan betapa pemaknaan pembangunan dan dampaknya hanya pada soal teknis akan menjadi sangat problematis.

Artikel tentang ASI eksklusif juga menarik untuk dibaca dalam kerangka kebudayaan dan pembangunan ini. Selama ini ASI eksklusif, dalam kebudayaan tertentu, sering dipahami sebagai tugas seorang ibu dan hanya menjadi persoalan domestik. Namun, penulis menunjukkan bahwa hal itu tidaklah demikian. Ini karena banyak sekali kaum ibu yang juga menjadi pekerja di ruang publik dan punya penting dalam penghasilan rumah tangga. Ini menjadikan tugas pemberian ASI eksklusif tidak bisa dimaknai hanya sebagai persoalan domestik, tapi juga persoalan bersama karena ia akan berdampak terhadap keluarga dan komunitas masyarakat yang lebih luas. Dalam kerangka ini, penulis menyoroti keterlibatan pasangan, keluarga, komunitas dan pemerintah dalam pemberian ASI eksklusif karena ia tidak lagi hanya bisa dipandang sebagai aktivitas biasa, tapi juga bagian dari kerja pembangunan yang tidak hanya beruang di level keluarga, tapi juga berdampak pada ruang publik.

Kebudayaan juga menjadi ruang tempat ekspresi dan pertarungan baru di tengah laju pembangunan yang timpang dan salah arah. Kasus rasisme mahasiswa Papua di Surabaya menjadi contoh menarik tentang penggunaan bahasa, sebagai bagian penting dari ekspresi kebudayaan, yang menjadi lokus pertarungan baru. Dengan meminjam konsep *resignification* dari Judith Butler (1997), penulis menyebut bagaimana frasa monyet yang tadinya disematkan pada mahasiswa Papua di Surabaya, diubah menjadi monyet Papua justru untuk mengkritik balik dan melawan wacana tentang Papua dan orangnya, serta menjadikan penggunaan frasa ini sebagai bagian dari argumen untuk tuntutan merdeka.

Tulisan mode pertukaran pangan di Sumba Barat (Daya) menampilkan argumentasi kebudayaan yang beraras pada sistem kepercayaan pada Marapu, yaitu seorang ayah sekaligus ibu pencipta dan perawat kehidupan (*Ama Mawolo Ina Marawi*). Masyarakat di pulau-pulau kecil di Maluku dan Nusa Tenggara Timur memilih untuk melakukan pertukaran pangan dari pada harus menjadi peminta-minta (*mandarauang*). Sebagai bagian dari refleksi proses penelitian partisipatoris berkesinambungan yang masih terus berlangsung sejak tahun 2015, tulisan ini menunjukkan betapa kebudayaan dan kontekstualisasinya mampu menjadi mantra guna meneguhkan upaya daulat pangan di daerah Sumba Barat (Daya).

Kebudayaan sebagai ruang pembentukan ekspresi diri dan masyarakat tergambar dari tulisan tentang ludruk dan *Watu Semar*. Dalam tulisannya tentang ludruk, penulis menggarisbawahi bahwa ludruk, dalam lanskap kebudayaan Jawa Timur, selama ini menjadi medium kesenian untuk mengekspresikan persoalan ekonomi dan penindasan dalam kehidupan sehari-hari. Tak jarang, ia juga menjadi medium perlawanan kebudayaan di masa perjuangan dan bahkan sebagai propaganda politik di era Orde Lama dan Orde Baru. Penulis menyebut bahwa pementasan dan pembuatan alur cerita ludruk sangat erat dipengaruhi oleh salah satu unsur pentingnya, yakni pengarang. Kondisi dan tantangan perubahan sosial yang dialami oleh pengarang dan masyarakat akan berdampak pada alur cerita dan pementasan ludruk tersebut.

Sementara itu, mitos *Watu Semar* di daerah Bojonegoro menunjukkan betapa ia menjadi titik penting bagaimana masyarakat memandang kehidupan dan relasi sosialnya. Dengan metode sastra lisan yang dipadu dengan studi di lapangan, tulisan ini menggaris bawahi bahwa, bagi masyarakat Bojonegoro, *Watu Semar* memiliki hubungan kuat dengan sosok Punakawan Semar yang sangat populer dalam kebudayaan Jawa. *Watu Semar* itu memiliki arti yang penting bagi mereka karena dianggap sebagai *dulur*, saudara kandung mereka sendiri. Sebagai bagian penting dari kepercayaan lokal, *Watu Semar* sangat bernilai historis dan dihormati oleh masyarakat sebagai bagian dari ekspresi budaya (*uri-uri budoyo*) masyarakat Desa Sambongrejo.

Tulisan terakhir berkaitan dengan bagaimana ekspresi kebudayaan ditampilkan lewat teknologi digital untuk menunjukkan betapa proyek pembangunan berdampak pada kesejahteraan keluarga. Tulisan berjudul Diskursus Kesejahteraan Keluarga dan Nilai Kerja pada Video Testimoni RPTRA menggarisbawahi bahwa pembangunan RPTRA, *Ruang Publik Terpadu Ramah Anak*, yang dibangun dengan tujuan meningkatkan kota menjadi lebih ramah pada anak sebagai bagian dari upaya mencapai sasaran kesejahteraan sebagaimana disebut dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*). Video testimoni RPTRA yang diunggah di kanal *Youtube* yang kemudian dianalisis dengan menggunakan *critical discourse analysis* ala Fairclough menemukan bahwa RPTRA tidak hanya memberikan manfaat konkret pada anak, tapi juga pada seluruh anggota keluarga, yang pada gilirannya akan

berkontribusi pada kesejahteraan keluarga. Penulis juga menyebutkan bahwa manfaat tersebut menjadi sumber nilai kerja bagi para staf RPTRA dalam melakukan pekerjaannya. Meski tidak secara eksplisit disebut, ekspresi kebudayaan yang dimediasi oleh teknologi ini menunjukkan betapa antara pembangunan dan kebudayaan bisa saling melengkapi dan berkontribusi dan tidak harus dipisahkan.

Pergumulan antara pembangunan dan kebudayaan akan terus berlangsung di masa-masa mendatang. Semoga Jurnal Masyarakat dan Budaya kali ini bisa memberikan sebagian gambaran tentang pergumulan yang dinamis itu dan dinikmati oleh para pembaca yang budiman.

Terima kasih dan selamat membaca.

Muhammad Khoirul Muqtafa

Jurnal Masyarakat dan Budaya

Volume 21 No. 3 Tahun 2019

STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERDASARKAN PREFERENSI MASYARAKAT ASLI: STUDI KASUS DI RAJA AMPAT

Ade Yunita Iriani
Institut Teknologi Nasional, Bandung
adeyunitasit@gmail.com

Abstrak

Kepulauan Raja Ampat yang dikenal sebagai wisata bahari menunjukkan perkembangan dengan jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat tiap tahunnya. Namun di dalam perkembangannya, kegiatan pariwisata Kepulauan Raja Ampat mengalami permasalahan berupa keterlibatan masyarakat asli yang masih rendah dalam usaha pariwisata di Kepulauan Raja Ampat dan adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi preferensi masyarakat asli Kepulauan Raja Ampat terhadap dampak pengembangan pariwisata yaitu pada lingkungan maupun perekonomian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode statistik deskriptif untuk menjelaskan karakteristik perkembangan pariwisata; metode penilaian tingkat kepuasan dan tingkat preferensi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata berdasarkan skala *likert*; serta analisis lingkungan strategis (IFAS-EFAS) untuk mengetahui potensi dan masalah serta pemetaan strategi pengembangan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pengembangan pariwisata Kepulauan Raja Ampat terhadap lingkungan dan perekonomian berpengaruh positif bagi masyarakat asli namun belum sepenuhnya sesuai harapan masyarakat sehingga diperlukan strategi yang sesuai dengan kondisi tersebut. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa strategi pengembangan pariwisata Kepulauan Raja Ampat yang sesuai untuk diterapkan adalah memanfaatkan peluang dan mengurangi kelemahan yang ada di Kepulauan Raja Ampat yaitu dengan meningkatkan potensi Sumber daya lokal yang berdaya saing, kreatif dan inovatif.

Kata kunci: pariwisata, dampak pengembangan pariwisata, preferensi masyarakat, masyarakat asli, sumber daya lokal.

DAMPAK SOSIAL-EKONOMI PEMINDAHAN PAKSA: STUDI ATAS PENYINTAS LUMPUR LAPINDO, JAWA TIMUR

Anton Novenanto
Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya
nino@ub.ac.id

Abstrak

Studi ini mengidentifikasi dan membahas dampak sosial-ekonomi yang disebabkan oleh pemindahan-paksa yang terjadi pascasemburan dan luapan lumpur Lapindo di Jawa Timur. Bingkai konseptual utama artikel ini mengacu pada pendapat yang melihat kasus lumpur Lapindo sebagai “bencana pembangunan” karena telah menyebabkan pemindahan-paksa penduduk yang terjadi secara besar-besaran. Studi ini membahas persoalan migrasi paksa yang dialami warga, seperti hilangnya akses terhadap tanah dan bangunan, perubahan jenis pekerjaan, gangguan akses terhadap fasilitas dan layanan publik, serta ikatan sosial. Bahan dasar studi ini berasal dari rangkaian kegiatan penelitian berbasis komunitas yang ditujukan untuk mengidentifikasi dampak multidimensi akibat semburan lumpur Lapindo pada enam komunitas mitra. Data dikumpulkan melalui kombinasi penyebaran kuesioner, diskusi kelompok terfokus, dan pengamatan. Penelitian mengikutsertakan anggota dari masing-masing komunitas tersebut selama proses perencanaan, pengambilan data, dan analisis data. Pelibatan semacam ini adalah sebuah strategi pemberdayaan warga terdampak melalui praktik berpikir kritis mempersoalkan realitas dan penarikan kesimpulan yang dapat menjadi modal budaya dalam melakukan pemberdayaan diri dan advokasi mandiri atas pemenuhan dan pemulihan hak-hak dasar yang tercerabut akibat bencana yang menderanya.

Kata kunci: pemindahan-paksa, lumpur Lapindo, penelitian berbasis komunitas, bencana pembangunan

FRAMING AND NAVIGATING BREASTFEEDING AS A DEVELOPMENT ISSUE

Sentiela Ocktaviana

Center for Society and Culture- Indonesian Institute of Sciences
sentiela.ocktaviana@lipi.go.id

Angga Sisca Rahadian

Center for Population- Indonesian Institute of Sciences
anggas.raha@gmail.com

Abstract

This study addresses the issue of working mothers and exclusive breastfeeding. The public overlooks breastfeeding activities by considering it merely as a mother's duty and a mundane matter. The involvement of husband, family, community, and government to support the success of exclusive breastfeeding is still lacking. Working mothers have a dual role, domestic and public duties. Breastfeeding is often a barrier for women's performance in the public sphere, and indirectly it impacts on household financial conditions. On the other hand, exclusive breastfeeding provides many benefits, primary for health and economic benefits. Therefore, this study analyzes breastfeeding activities through the development paradigm and finds the proper strategy for stakeholders to navigate breastfeeding as a development activity. The approach used in this research is qualitative by conducting interviews with stakeholders and literature review. The concepts of gender and development are applied to analyze the involvement of partners, families, and communities in supporting the achievement of exclusive breastfeeding. The government also has an essential role in ensuring women and men to have equal rights in the workplace and the domestic sphere to do household chores and to bear the children. The social movement is effective in providing an understanding to the public that ensuring exclusive breastfeeding is a responsibility for all stakeholders.

Keywords: women, men, gender, exclusive breastfeeding, development

RESIGNIFICATION: WACANA BALIK ORANG PAPUA DALAM MENANGGAPI RASISME

Ubaidillah

Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB-LIPI)
23ubaid@gmail.com

Abstrak

Terjadi pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya oleh berbagai pihak, mulai dari tentara, satuan pamong praja, kepolisian, sampai organisasi masyarakat pada 16-17 Agustus 2019. Massa pengepung meneriaki mahasiswa Papua dengan kata *monyet*. Artikel ini menggunakan teori *resignification* Judith Butler (1997) untuk melihat bagaimana orang-orang Papua sebagai korban ujaran rasial mampu berbicara balik kepada pelaku setelah mengemansipasi dirinya sendiri dari jejaring konteks sosial yang diskriminatif. Keutamaan *resignification* yang diusulkan Butler sebagai cara menanggapi ujaran kebencian adalah pemanfaatan logika internal ujaran yang disusun oleh pelaku sebagai sumber daya untuk menyusun wacana balik. Pola *resignification* yang dilakukan orang Papua adalah meliyankan diri sendiri dengan menggunakan frasa '*monyet Papua*' dalam wacana baliknya. Frasa '*monyet Papua*' ini merupakan bentuk reartikulasipembedaan diri yang dilakukan dalam ujaran rasis '*monyet*'. Cara ini digunakan untuk melucuti otoritas pelaku ujaran, mempersatukan orang-orang Papua, dan mampu menjustifikasi tuntutan untuk merdeka dari kolonialisasi Indonesia. Peralihan fokus diskursus wacana balik orang Papua dari melawan rasisme menjadi tuntutan kemerdekaan Papua dapat pula dibaca sebagai upaya taktis untuk melakukan afirmasi kesetaraan status antara manusia Indonesia dan manusia Papua. Cara pandang bahwa perlakuan rasisme adalah bagian dari tindakan kolonialisasi Indonesia terhadap Papua melandasai pola interpretasi ujaran rasis Surabaya sehingga menghasilkan pola wacana balik yang demikian.

Kata kunci : ujaran rasis, *resignification*, interpelasi, rekognisi, orang-orang Papua

REPRODUKSI MODA (PERTUKARAN) PANGAN: MENYEMAI DAULAT HIDUP DI SUMBA BARAT (DAYA)

PM Laksono, Esti Anantasari, Olga Aurora Nandiswara
Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada
laksono@ugm.ac.id, esti.anantasari@ugm.ac.id, olgaaauroran@gmail.com

Abstrak

Ekonomi orang-orang Kodi, Kabupaten Sumba Barat (Daya), masih menyatu dalam totalitas organisasi sosial sistem kekerabatan yang dibayangkan memancar dari sistem kepercayaan pada Marapu, yaitu seorang ayah sekaligus ibu pencipta dan perawat kehidupan (*Ama Mawolo Ina Marawi*). Oleh karena itu, garis kerabat baik dari sisi ayah maupun ibu, masing-masing secara kreatif dilantunkan demi tegaknya moralitas pertukaran, yaitu jalannya ekonomi-Uma. Secara simbolik pertukaran itu diritualkan pada pesta adat. Artikel ini dapat diperlakukan sebagai penggalan reflektif cuplikan dari proses penelitian partisipatoris berkesinambungan yang masih terus berlangsung sejak tahun 2015. Proses itu terkait dengan usaha bersama warga masyarakat untuk memilih dan mereproduksi moda pertukaran pangan, tanpa harus menjadi peminta-minta (*mandara uang*), di pulau-pulau kecil di Maluku dan Nusa Tenggara Timur demi kedaulatan pangan mereka. Oleh karena itu, dalam studi ini Sumba Barat Daya akan terkoneksi secara komparatif dengan kabupaten dan pulau-pulau lainnya.

Kata kunci: transformasi sosial; paceklik; moralitas pertukaran; *mandara*; kedaulatan pangan

TRAGEDI KEBUN TEBU: PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL PADA PERTUNJUKAN LUDRUK

Herlina Kusuma Wardani, Andayani, Djoko Sulaksono, Kundharu Saddhono
Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta
wardani.herlinakusuma@gmail.com; bu_anda09@yahoo.co.id; ciptaningmintaraga@yahoo.com; kundharu@uns.ac.id

Abstrak

Ludruk merupakan budaya Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Ludruk merupakan sarana hiburan yang fenomenal pada saat itu. Cerita ludruk diambil dari kisah kehidupan sehari-hari yang dialami oleh masyarakat bawah yang mengalami kesulitan ekonomi dan ketertindasan. Oleh karena itu, ludruk juga menjadi alat perjuangan di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Bahkan juga menjadi alat propaganda partai politik di masa Orde Lama maupun Orde Baru. Salah satu unsur yang sangat penting dalam pementasan ludruk ialah adanya pengarang. Pengalaman kehidupan pengarang memiliki andil yang besar dalam proses pembuatan cerita ludruk. Tulisan ini mendeskripsikan perubahan sosial yang dialami pengarang dan masyarakat yang diangkat di dalam lakon ludruk *Tragedi Kebun Tebu*, yang dianalisis menggunakan sosiologi sastra. Tulisan ini menyimpulkan bahwa pengarang dan masyarakat mengalami perubahan sosial yang berkaitan dengan latar belakang keluarga dan tantangan masa depan, perubahan kepemimpinan grup ludruk Karya Budaya dan siasat menghadapi tantangan, karier pengarang dan kesempatan kerja bagi masyarakat, ideologi pengarang dan perubahan sosial masyarakat, serta menyikapi travesti di masyarakat.

Kata kunci: pengarang, masyarakat, Ludruk, sosiologi sastra.

WATU SEMAR: SEBUAH REFLEKSI PEMIKIRAN DAN BUDAYA LOKAL MASYARAKAT SAMBONGREJO, BOJONEGORO

Milawaty

Department of Literature and Cultural Studies, Faculty of Humanities, Airlangga University
milawaty-2017@fib.unair.ac.id

Abstrak

Mitos *Watu Semar* di Bojonegoro sangat kuat, sehingga tulisan ini mengungkap makna dan peran *Watu Semar* bagi masyarakat pemilik mitos, yakni para penduduk asli Desa Sambongrejo di Kabupaten Bojonegoro. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemikiran dan budaya lokal masyarakat tersebut melalui keberadaan serta mitos *Watu Semar* melalui studi lapangan dengan wawancara mendalam yang dipadukan dengan teori Kritik Sastra Lisan dari Alan Dundes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitos *Watu Semar* yang dipercaya memiliki hubungan kuat dengan sosok Punakawan Semar dilanggengkan melalui pewarisan secara turun-temurun sebagai budaya kepercayaan khas masyarakat Sambongrejo. Bagi mereka, *Watu Semar* memiliki arti yang signifikan sebagai *dulur*, saudara kandung mereka sendiri, dan bernilai historis, sehingga begitu dihormati. *Watu Semar* berperan sebagai simbol kepercayaan lokal serta bentuk ekspresi budaya (*uri-uri budoyo*) masyarakat Desa Sambongrejo. Oleh karena itu, bagi masyarakat Sambongrejo, keberadaan *Watu Semar* memiliki pengaruh yang sangat besar dan substansial.

Kata kunci: budaya lokal, mitos, pemikiran, masyarakat Sambongrejo, *Watu Semar*

DISCOURSE OF FAMILY WELL-BEING AND THE VALUE OF WORK AT RPTRA'S TESTIMONIAL VIDEOS

Sunar Wibowo, Rustono Farady Marta, Hana Panggabean

^{1,3}Faculty of Psychology, Atma Jaya Catholic University of Indonesia, Jakarta, Indonesia
fxsoenwi@gmail.com, rmarta@bundamulia.ac.id, hanaatmoko@atmajaya.ac.id

Abstract

Well-being is one of the global SDGs (Sustainable Development Goals) movement in which Indonesian Government formally join. Integrated child friendly public spaces (Ruang Publik Terpadu Ramah Anak or abbreviated as RPTRA – in Indonesian), are built for improving cities to become Child Friendly Cities, which actually serve as a component for achieving this well-being SDG. This study aims to show how RPTRA staff creatively communicate to public by uploading testimonial videos on YouTube, which is intended to show how RPTRA's existence is perceived by its surrounding community. By analyzing such videos using the Fairclough's critical discourse analysis, it was found that RPTRAs provide real benefits not only to children, but also to all family members, contributing to family well-being. To put it in the context of RPTRA employment phenomena, the testimonial video also reveals that the benefits of the RPTRA to its visiting children become the sources of work values to the RPTRA staff.

Keywords: family well-being, value of work, child development.